

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PERABOTAN
RUMAH TANGGA DENGAN SISTEM HADIAH
(Studi di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

Nur Tiara Sari

1521030256

Program Studi : Muamalah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2019 M**

ABSTRAK

Islam merupakan agama yang sempurna, menjadi penyeimbang dan pengatur bagi pemeluknya dalam menyelaraskan hubungannya dengan masyarakat yang satu dengan yang lainnya (*bermuamalah*). Adapun salah satu bentuk hubungan tersebut yaitu jual beli. Jual beli adalah hal yang tidak akan pernah terlepas dari aktivitas kehidupan manusia yang merupakan kegiatan menukarkan barang dengan barang, atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar kerelaan. Kegiatan jual beli saat ini terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, tempat dan waktu. Para pedagang berlomba-lomba melakukan strategi penjualan dengan tujuan menarik minat beli konsumen, salah satu contohnya adalah dengan memberikan hadiah atas poin kupon yang berhasil dikumpulkan oleh pembeli. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung yang memberlakukan pemberian hadiah berdasarkan poin kupon hadiah atas pembelian yang mencapai nominal tertentu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem hadiah dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai jual beli dengan sistem hadiah yang dilakukan oleh Toko Pelangi ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang pemilik Toko memberlakukan pemberian hadiah dalam transaksi jual beli, bagaimana praktiknya dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli yang disertai dengan pemberian hadiah di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitik. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden, yakni 1 orang pemilik Toko, 2 orang pramuniaga, dan 11 orang pembeli di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung. Dalam memperoleh data, metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan *editing* dan *organizing* dan menganalisa data yang telah terkumpul menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan penurunan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diselidiki dengan cara menelaah dan menganalisis suatu data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem hadiah yang terjadi di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung tidak sesuai dengan syarat jual beli disertai hadiah. Dalam praktik nya ditemukan adanya penambahan harga yang diberikan penjual kepada pelanggan untuk setiap pembelian barang, yang mana uang hasil penambahan harga itu digunakan penjual untuk membeli hadiah yang diberikan kepada pelanggan yang berhasil mengumpulkan dan menukarkan poin kuponnya. Praktik di atas tidaklah sesuai dengan hukum Islam, karena pada dasarnya jual beli disertai hadiah diperbolehkan dengan syarat harga yang dijual haruslah sama dengan harga yang dijual oleh pedagang lain agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, mendorong pembeli untuk bersikap boros, dan *mubazir*. Oleh karena itu praktik tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Tiara Sari

NPM : 1521030256

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Dengan Sistem Hadiah (Studi di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung)" adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Oktober 2019
Penulis

Materai
6000

Nur Tiara Sari



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Perabotan
Rumah Tangga Dengan Sistem Hadiah (Studi di Toko
Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa : Nur Tiara Sari
NPM : 1521030256
Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syari'ah

DISETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum
NIP. 197005022000032001

Sucipto, S. Ag., M.Ag
NIP. 196612271995031001

Mengetahui
Ketua Prodi Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 187807252009121003







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PERABOTAN RUMAH TANGGA DENGAN SISTEM HADIAH (Studi di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung)**. Disusun oleh NUR TIARA SARI NPM 1521030256 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Rabu 8 April 2020

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. H. Khoirul Abror, M.H	()
Sekretaris	: Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag	()
Penguji I	: Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H	()
Penguji II	: Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum	()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Khairuddin, M. H
NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah (2) : 188)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala sesuatunya, juga sholawat dan salam tercurah untuk Baginda Nabi Muhammad Saw sang penuntun, penerang dan pemberi syafa'at, yang tanpa cahaya Islam yang dibawanya, manusia buta dan meraba-raba dalam gelapnya menyusuri kehidupan, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Ayahanda Na'im dan Ibunda Sri Wahyuni yang telah banyak berjuang dan tidak pernah luput mendoakan untuk keberhasilanku di setiap gerak, hembus, dan langkah kakiku. Terimakasih untuk segala keridhoan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini menjadi kado terindah bagi kedua orangtuaku.
2. Kakkaku Dodi Sukma serta keluarga besarku yang selalu menyemangati dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nur Tiara Sari, seorang Mahasiswi yang akhirnya mampu menyelesaikan masa studinya, tetapi meskipun demikian ia masih tetap harus terus berjuang dan terus belajar, karena sejatinya belajar dan berjuang itu tiada henti meski studi telah berakhir kini. Penulis adalah anak bungsu yang lahir dan besar dari pasangan Bapak Na'im dan Ibu Sri Wahyuni di Panjang 28 Mei 1997.

Latar belakang pendidikan penulis bermula di Taman Kanak-Kanak (TK) Bina Harapan Panjang, dengan menempuh pendidikan 1 tahun dan selesai pada tahun 2003, di tahun selanjutnya penulis melanjutkan sekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Panjang Utara dengan menempuh pendidikan 6 tahun dan selesai pada tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 30 Bandar Lampung dengan menempuh pendidikan 3 tahun dan selesai pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Gajah Mada Bandar Lampung dengan menempuh pendidikan selama 3 tahun dan selesai pada tahun 2015.

Selanjutnya setelah lulus, penulis melanjutkan studinya di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1), tepatnya di Fakultas Syari'ah pada program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah).

Bandar Lampung, Oktober 2019
Penulis

Nur Tiara Sari
NPM. 1521030256

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan kenikmatan berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan, hidayah dan inayah-Nya. Shalawat serta salam tak lupa pula terhaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PERABOTAN RUMAH TANGGA DENGAN SISTEM HADIAH (Studi di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung"** yang mana sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena Penulis hanyalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Namun, terlepas dari itu dalam hal ini Penulis bersyukur atas bantuan, bimbingan, kritik, saran dan motivasi yang telah diberikan oleh semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Alamsyah, S. Ag, M. Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menimba dan menambah ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. K.H Khoiruddin Tahmid, M.H selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

3. Khoiruddin, M.S.I selaku ketua jurusan Muamalah dan Bapak Khairuddin, M. S.I selaku sekretaris jurusan Muamalah, serta para staf jurusan yang telah memberi motivasi dan kemudahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Erina Pane, S.H., M.Hum dan Bapak Sucipto, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, khususnya prodi Muamalah atas didikan, ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah melayani an mempermudah proses penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat Relawan Ilallah Madrasah Relawan Lampung Batch VI& Batch VII, Relawan Semarak Lampung, Pemuda mengabdi, Volunteer World Rhino Day, Alumni US2I, Alumni Rohis SMK Gajah Mada Bandar Lampung, sahabat-sahabat UKMF Gemais, sahabat-sahabat Medkom dan Keputrian yang selalu mensupport, mendoakan dan memotivasi dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuanganku Siti Kholifah, Etika Yolan Melati, S.H, Siti Hanivah, Riska Anggraini, Siti Izzah Qomariah, Yeyen, sahabat-sahabat Kulta 2015 Kelompok 8, dan Sahabat-sahabat KKN'08 Desa Marga Kaya

yang menjadi tempat bercerita, teman berproses, bertukar pikiran, memberi support dan doa dalam penyusunan skripsi ini.

9. Terimakasih kepada teman-teman Muamalah B'15 yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada pemilik Toko Pelangi dan 11 narasumber yang telah membantu memberi informasi guna menyelesaikan karya ilmiah ini.
11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan yang telah mendidik dan mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.



HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii

KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam	16
1. Pengertian Jual Beli.....	16
2. Landasan Hukum Jual Beli	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
B. Hadiah	
1. Pengertian Hadiah	35
2. Dasar Hukum Hadiah	39
3. Rukun Hadiah.....	41
4. Syarat Hadiah	44
5. Macam-Macam Hadiah.....	47
6. Hikmah Hadiah	51
C. Jual Beli Disertai Hadiah	
1. Syarat Jual Beli Disertai Hadiah	56
2. Hukum Jual Beli Disertai Hadiah	57

BAB III PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Toko Pelangi	
1. Sejarah Berdirinya Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso Panjang-Bandar Lampung	62
2. Struktur Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung	63
3. Permodalan Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung	65
B. Pengaplikasian Jual Beli dengan Pemberian Kupon	67
C. Latar Belakang Pemberian Hadiah dengan Menggunakan Kupon	68

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Jual Beli Perabotan Rumah Tangga dengan Pemberian Kupon Hadiah di Toko Pelangi Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung.	75
---	----

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Perabotan Rumah Tangga dengan Pemberian Kupon Hadiah di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung.....	77
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Tabel

Halaman

1.1. Data pembelian Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung Bulan Oktober 2019	12
1.2. Data Laporan Keuangan Toko Pelangi Bulan Oktober 2019	66
1.3. Daftar Poin Penukaran Hadiah Toko Pelangi	69

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
G. Penegasan Judul	1
H. Alasan Memilih Judul	3
I. Latar Belakang Masalah.....	4
J. Rumusan Masalah	8
K. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
L. Metode Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
D. Jual Beli dalam Hukum Islam	16
4. Pengertian Jual Beli.....	16
5. Landasan Hukum Jual Beli	21
6. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
E. Hadiah	
7. Pengertian Hadiah	35
8. Dasar Hukum Hadiah	39
9. Rukun Hadiah.....	41
10. Syarat Hadiah	44
11. Macam-Macam Hadiah.....	47
12. Hikmah Hadiah	51
F. Jual Beli Disertai Hadiah	
3. Syarat Jual Beli Disertai Hadiah	56
4. Hukum Jual Beli Disertai Hadiah	57

BAB III PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN

D. Gambaran Umum Toko Pelangi	
4. Sejarah Berdirinya Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso Panjang-Bandar Lampung	62
5. Struktur Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung	63
6. Permodalan Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung	65
E. Pengaplikasian Jual Beli dengan Pemberian Kupon	67
F. Latar Belakang Pemberian Hadiah dengan Menggunakan Kupon	68

BAB IV ANALISIS DATA

C. Praktik Jual Beli Perabotan Rumah Tangga dengan Pemberian Kupon Hadiah di Toko Pelangi Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung.	75
D. Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Perabotan Rumah Tangga dengan Pemberian Kupon Hadiah di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung.....	77

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan	81
D. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1.4. Data pembelian Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung Bulan Oktober 2019	12
1.5. Data Laporan Keuangan Toko Pelangi Bulan Oktober 2019	66
1.6. Daftar Poin Penukaran Hadiah Toko Pelangi	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari penulisan judul skripsi ini yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Dengan Sistem Hadiah (Studi di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung)**" guna menghindari kesalahpahaman dan kesalahartian dalam memahami judul tersebut, maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

- a. Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²
- b. Hukum Islam merupakan rangkaian kata dari “Hukum” dan kata “Islam”. Secara terpisah, kedua kata itu merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan juga dalam bahasa Indonesia baku. Hukum Islam yaitu seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul.³
- c. Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah Swt. yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan persoalan-persoalan baru yang muncul secara

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h.1060

³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.9

terus menerus masih perlu dicari jawabannya dengan jalan ijtihad berdasarkan syari'ah yang disebut dengan istilah fiqh.⁴

- d. Tinjauan hukum Islam adalah sudut pandang terhadap kumpulan peraturan dalam agama, serta upaya para ahli fiqh (*Fuqaha*) dalam menetapkan syari'at untuk kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan segala perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat yang berkaitan dengan tingkah laku manusia.
- e. Jual beli secara fiqh disebut dengan *al-ba'i'* (البيع) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata "*al-ba'i'*" dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *asy-syira'* (beli). Kata "*al-ba'i'*" yang berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari, istilah *al-ba'i'* diartikan jual beli.⁵ Singkatnya, pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam) dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain.⁶
- f. Hadiah adalah sesuatu yang diberikan dengan maksud untuk mengagungkan atau karena rasa cinta.⁷ Hadiah juga merupakan sesuatu yang diberikan dengan maksud sebagai bukti kasih sayang dan adanya persahabatan.

⁴Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah: Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim*, (Yogyakarta: LKiS 2016), h.197

⁵Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017), h.66

⁶Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.140

⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.241

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi yang akan penulis teliti adalah pelaksanaan jual beli dalam bentuk perabotan rumah tangga yang disertai dengan pemberian hadiah dalam bentuk poin kupon yang terjadi di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Alasan Objektif

Alasan objektif yang membuat penulis tertarik untuk memilih dan membahas judul ini, karena adanya penambahan harga jual yang dilakukan oleh Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung untuk memberlakukan sistem pemberian hadiah pada penjualannya dan adanya pihak yang merasa keberatan dengan adanya praktik jual beli dengan sistem pemberian hadiah di Toko ini, maka penelitian ini perlu diadakan guna menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.

2. Alasan Subjektif

a. Pembahasan judul ini relevan dengan bidang keilmuan yang dipelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung. Selain itu pula terdapat sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses penulisan skripsi ini seperti literature-literatur, referensi-referensi yang mudah didapatkan, serta adanya informasi dan data-data yang dibutuhkan.

- b. Berdasarkan data jurusan, judul yang diajukan penulis belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, terutama di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, sehingga memungkinkan penulis untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, menjadi pengatur bagi pemeluknya dalam menyelaraskan hubungannya dengan masyarakat yang satu dan yang lainnya. Agar terciptanya kemaslahatan umum tanpa ada pendzoliman hak, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa manusia memiliki sifat laba dan tama' yang suka mementingkan diri sendiri dan kalau kita biarkan kehancuran hidup manusia akan terjadi. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah muamalah.⁸ Adapun bentuk dari hubungan masyarakat dalam bermuamalah salah satu di antaranya adalah jual beli. Jual beli adalah hal yang tidak pernah terlepas dari aktivitas kehidupan manusia yang merupakan kegiatan menukarkan barang dengan barang, atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu terhadap yang lain atas dasar kerelaan dan didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak. Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat (275):

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

⁸Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.11

Artinya: “..dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”⁹

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah Swt. adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara menyebabkan kemudharatan, maka Allah Swt. akan melarangnya. Sebaliknya jika terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Hal ini sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 198.¹⁰

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya: “..Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu..”¹¹

Ayat di atas menunjukkan keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah Swt. dan dalam konteks jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan, dengan demikian, legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara’.¹²

Islam telah menetapkan aturan-aturan hukum tentang jual beli seperti halnya yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. baik mengenai rukun, syarat, maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan, dengan perkembangan jual beli yang semakin berkembang inilah tentunya pembeli harus berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 36

¹⁰Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam” *Jurnal Ummul Qura* Vol III, No. 2, Lamongan 2013, h. 61

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 24

¹²*Ibid*, h.62

Jual beli pada era modern saat ini, sangat banyak sekali praktik pemberian hadiah. Pemberian hadiah tersebut ada yang melalui undian berhadiah, yang mana seorang pembeli dengan ketentuan yang berlaku akan diberikan kupon yang kemudian akan diundi untuk mendapatkan hadiah yang sudah tercantum di dalamnya. Lalu, ada pula pemberian hadiah melalui pengumpulan poin, yang mana pihak penyelenggara mengumumkan bahwasanya hadiah akan diberikan jikalau orang tersebut telah mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, sesuai dengan ketentuan pihak penyelenggara. Pemberian hadiah biasanya diberikan dengan tujuan menarik minat beli konsumen terhadap suatu barang, baik pada produk itu sendiri maupun pada Toko tempat barang tersebut dijual. Sehingga masyarakat menganggap hal tersebut adalah suatu kebiasaan yang tentunya menguntungkan.

Istilah hadiah berasal dari kata *Hadi* (هادي) terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf ha', dal, dan ya. Maknanya berkisar pada dua hal. *Pertama*, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata *Hadi* yang bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. *Kedua*, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata *hidayah* (هدية) yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.

Hadiah sering disebut juga hibah. Adapula yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dalam macam-macam hibah. Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah. Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan). Menurut istilah *syar'i*, hadiah ialah menyerahkan suatu benda

kepada orang tertentu agar terwujudnya hubungan baik dan mendapatkan pahala dari Allah tanpa adanya permintaan dan syarat.

Penulis menyimpulkan bahwa hadiah merupakan pemindahan kepemilikan suatu harta bukan hanya manfaatnya saja, tetapi juga zatnya. Sebab, jika hanya manfaatnya saja, namun zatnya tidak maka itu dinamakan (*ijarah*). Karena hadiah haruslah merupakan *tamlikan li al-'ayn* (pemindahan/penyerahan pemilikan atas suatu harta kepada pihak lain). Penyerahan kepemilikan itu harus dilakukan selagi pemilik barang itu masih hidup, sebab jika sudah mati maka merupakan wasiat. Di samping itu pula penyerahan hadiah haruslah tanpa kompensasi (*tamlikan li al-'ayn bi la iwadh*), karena jika dengan kompensasi maka disebut jual beli (*al-ba'i*).

Di daerah Panjang-Bandar Lampung, tepatnya di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung merupakan Toko yang ada di Pasar Panjang Bandar Lampung yang dalam jual belinya menerapkan pemberian hadiah melalui poin kupon, namun tidak semua pembeli mendapatkan poin kupon hadiah tersebut. Dalam praktiknya, Toko ini memberikan kupon pada setiap pembelian dengan penentuan jumlah harga pembelian tertentu. Biasanya, pembeli akan mendapatkan poin kupon hadiah jika barang yang ia beli di Toko itu minimal harganya Rp.50.000, maka pembeli akan mendapat 5 poin kupon hadiah. Dan sistem pemberian hadiahnyapun ditentukan pada jumlah poin kupon yang telah dimiliki oleh pembeli dengan ditukarkan pada barang yang sejumlah dengan poin kupon yang dimiliki. Semisal jika pembeli telah mengumpulkan kupon dengan poin 25, maka kupon tersebut bisa ditukarkan dengan barang berupa payung ataupun selusin piring dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan pemilik Toko.

Berdasarkan fenomena ini, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan jual beli dengan sistem pemberian hadiah. Penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Perabotan Rumah Tangga dengan Sistem Hadiah (Studi di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung."

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan di uraikan dalam penelitian adalah dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan jual beli dengan pemberian poin kupon hadiah dalam praktik jual beli perabotan rumah tangga di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso Panjang-Bandar Lampung sudah sesuai dengan aturan jual beli?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem pemberian hadiah berupa poin kupon hadiah berdasarkan besarnya jumlah harga pembelian di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli dengan sistem hadiah melalui pemberian poin kupon di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung.

- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli dengan sistem pemberian hadiah melalui poin kupon hadiah berdasarkan ketentuan besarnya jumlah harga pembelian di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa buku bacaan perpustakaan di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Lampung, khususnya Fakultas Syari'ah pada program Muamalah, selain itu juga dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi Khazanah Ekonomi Islam dan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai sistem jual beli yang terus berkembang di masyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas isu tertentu.¹³ Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan penelitian, maka metode penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹³Jozef. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 2-3

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penyusun lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari data secara langsung ke lapangan dengan melihat lebih dekat objek yang akan diteliti.¹⁴ Dinamakan studi lapangan (*field research*) karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan. Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.¹⁵ Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan rumusan masalah diatas, yaitu meliputi:

- 1) Data tentang praktik penukaran kupon hadiah
- 2) Data tentang pembeli perabotan rumah tangga

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat mungkin tentang sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹⁶ Sedangkan analitik, yaitu menganalisis masalah dan diolah dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam.¹⁷ Dalam kaitannya penelitian ini, peneliti menggambarkan tentang pelaksanaan jual beli dengan sistem pemberian hadiah di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung.

¹⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1986), h. 27

¹⁵Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011),

¹⁶Moh. Nazir, *Metode Peneelitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.54

¹⁷Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset*, h.34

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti yang bersumber dari pemilik Toko, pramuniaga Toko, dan pembeli di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data pendukung proyek penelitian dan sebagai pelengkap data primer, mengingat data primer adalah data praktik dalam lapangan.¹⁹ Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, jurnal, literatur yang terkait dengan konsep hukum Islam, buku-buku, dan catatan yang kesemuanya itu mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.²⁰ Bisa juga disebut sebagai himpunan

¹⁸Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.7

¹⁹Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010), h. 236

²⁰Soeharjo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2002), h.172

karakteristik, baik dari keseluruhan karakteristik maupun objek yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah 117 orang konsumen yang melakukan pembelian di Toko Pelangi pada bulan Oktober 2019 yang jumlah keseluruhannya didapat dari penghitungan yang dilakukan oleh Toko Pelangi selama 1 bulan yaitu tepatnya pada bulan Oktober 2019.

Daftar Tabel 1.1 Data Pembeli Bulan Oktober 2019

No	Keterangan	Pembeli
1.	Oktober – minggu ke-1	28
2.	Oktober – minggu ke-2	18
3.	Oktober – minggu ke-3	34
4.	Oktober – minggu ke-4	37
Jumlah		117

Sumber: Data pembeli bulan Oktober 2019²¹

Adapun dalam penelitian ini, 1 orang pemilik Toko dan 2 orang pramuniaga sebagai informen.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari

²¹ Anggita Sari, wawancara dengan Penulis, Bandar Lampung, 31 Oktober 2019

semua yang ada dalam populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu sendiri.²² Berdasarkan teori Suharisimi Arikunto apabila populasi kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, tetapi jika jumlah populasinya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 15-20% atau lebih²³ dari teori tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel sebesar 10% dari keseluruhan populasi yang berjumlah 117 orang, sehingga ditemukan sampel sebesar 11 orang pembeli. Adapun teknik yang digunakan dalam memilih sampel adalah *purposive sampling* yaitu teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan *random*, daerah atau sastra, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.8

²³Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.134

atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²⁴ Pada penelitian ini data di peroleh dengan cara melihat di lapangan terhadap transaksi jual beli dengan sistem hadiah yang sedang berlangsung di Toko Pelangi Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada objek dalam penelitian ini berupa buku, analisis yang mendukung dalam penelitian.²⁵ Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem pemberian hadiah di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung.

c. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).²⁶ Dalam wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara dengan responden yaitu pemilik Toko, pramuniaga Toko, dan pembeli di Toko Pelangi, dengan menggunakan teknik wawancara berstruktur, yaitu dimana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara.

²⁴Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, h.7

²⁵Ronny Kountur, *Metodologi Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: UI Pers 2014), h. 41-43

²⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

5. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan Data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁷ Metode ini digunakan untuk memeriksa, meneliti, serta mendeskripsikan data yang relevan dengan penelitian jual beli perabotan rumah tangga dengan pemberian hadiah di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematika data yang telah dikumpulkan sehingga dapat digunakan dalam penulisan skripsi seperti apa yang diinginkan oleh peneliti yang terkait dengan pemberian hadiah dengan penukaran poin kupon dari pembelian barang-barang perabotan rumah tangga di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung.

6. Analisis Data

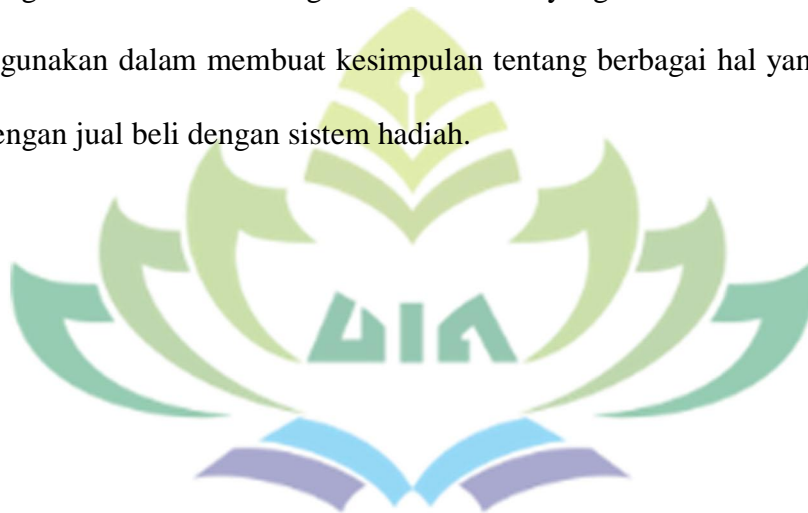
Analisis data adalah proses mencari, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.²⁸ Setelah data terhimpun, selanjutnya data dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data

²⁷Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 115

²⁸Lexy J. Maloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h.205

deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang telah diinterview.²⁹

Setelah analisa data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu sesuai penjelasan dan penginterpretasian secara logis, dan sistematis, kemudian dari hasil tersebut ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.³⁰ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem hadiah.



²⁹*Ibid*, h.7

³⁰Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dan beli sendiri memiliki arti yang bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan artian bahwa jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yang mana satu pihak menjual dan pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan istilah *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* di dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.³¹

Terdapat beberapa pengertian jual beli, baik secara *etimologi* (bahasa) maupun *terminologi* (istilah). Jual beli secara bahasa (*etimologi*) berasal dari bahasa Arab *al-bai'* yang berarti:

مُقَا بَلَاءُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

"Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)."³²

³¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 111

³²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), h. 344. Pengertian yang sama diungkapkan oleh Ali Fikri, *al-Muamalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah*, (Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1357), h. 8

Dalam artian lain, kata jual beli (*al-ba'i*) adalah *al-tijarah* (perdagangan).

Hal ini sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Fathir (35) ayat 29:

...يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّانْ يَبُورَ ٢٩

Artinya: "...Mereka itu mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi."³³

Secara istilah (*terminologi*) Ulama Fiqh mengemukakan beberapa definisi jual beli, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.³⁴

Adapun pendapat mengenai jual beli yang dikemukakan para Ulama Fiqh sebagai berikut:

a. Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli adalah :

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ, أَوْ مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ
بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya : "Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat."³⁵

Dari definisi yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah diatas dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud Ulama Hanafi dengan berdasarkan cara tertentu (khusus) adalah melalui *ijab*, yaitu ungkapan membeli dari pembeli dan *qabul* yaitu pernyataan menjual dari penjual.

b. Menurut Ulama Malikiyah, beliau membaginya menjadi dua macam definisi, yaitu :

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 438

³⁴Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 11

³⁵Abdurahman al-Jazairy, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Juz II*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 135

1) Jual beli dalam arti umum

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَا وَضْعٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتْعَةً لِّذَّةٍ

Artinya : "Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan."³⁶

Hal ini dapat diambil pengertian bahwa jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan didasari atas kemanfaat dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sedangkan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), yang berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaat atau hasilnya.

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda sedangkan pihak lain menyerahkan barangnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau sesuai ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*.³⁷

2) Jual beli dalam arti khusus

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتْعَةً لِّذَّةٍ ذُومُكَائِسَةٍ أَحَدٌ عَوَضِيَّهُ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ مُعَيَّنٌ غَيْرُ أَلْعَيْنِ فِيهِ

Artinya : "Jual beli adalah akad *muawadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang."³⁸

³⁶Syamsudin Muhammad ar-Raml, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 204

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ..., h.69

³⁸Syamsudin Muhammad Ar-Raml, *Nihayah al-Muhtaj*..., h. 372

Dalam arti khusus, jual beli ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaran bukan emas, bukan pula perak, benda yang dapat direalisasikan, dan ada sertifikat (tidak diragukan).³⁹ Tidak merupakan utang, baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau yang sudah diketahui terlebih dahulu.⁴⁰

- c. Menurut Ulama Hanbali, jual beli adalah saling menukarkan suatu harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁴¹
- d. Menurut Ulama Syafi'i, beliau memberikan definisi jual beli, yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhoan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.⁴²
- e. Menurut Imam Nawawi di dalam *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, jual beli adalah:

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًَا

"Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan."⁴³

- f. Menurut Ibnu Qudamah di dalam *al-Mughni* menyebutkan bahwa jual beli adalah :

³⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 70

⁴⁰*Ibid*

⁴¹Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz al-Manhaj*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 13

⁴²Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Terjemahan Oleh Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaliddin, Jilid II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 1

⁴³Abu Zakaria bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 149

مُبَا دَلَةُ الْمَالِ بِمَالٍ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

"Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik."⁴⁴

Dalam istilah lain seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dikemukakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁴⁵

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang telah diserahkannya. Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran barang yang diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang telah diterimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka atau rela sama rela antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya, sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'*.

Jual beli haruslah sesuai dengan ketentuan hukum, artinya harus memenuhi persyaratan, rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual

⁴⁴Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz III, (Beirut: Dar al-Ilm al-Kutub, 1997), h.559

⁴⁵R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Praditya Paramita, 1983)

beli. Maka, apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti jual beli tersebut tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*. Terkait hal benda yang diperjual belikan, yaitu mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai serupa benda-benda berharga dan penggunaannya dapat dibenarkan oleh *syara'*, benda tersebut adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tidak bergerak (tidak dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, namun adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut diperbolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*.⁴⁶

2. Landasan Hukum Jual Beli

Pada dasarnya hukum jual beli adalah *mubah* (boleh), kecuali yang jelas dilarang oleh *syara'*. Adapun hukum disyariatkannya jual beli terdapat di dalam Qur'an, Hadist dan Ijma' diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275:

Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:⁴⁷

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."⁴⁸

⁴⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.69

⁴⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 114

Ayat di atas secara umum dengan tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT secara tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli dan riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut bagaimana cara memperoleh keuntungan di samping tanggung jawab resiko kerugian yang timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.⁴⁹

2) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 282:

...وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: "Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi, jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran terhadap kamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."⁵⁰

3) Q.S. An-Nisa (4) ayat 29:

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: "...Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku suka sama suka diantara kamu..."⁵¹

Isi kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h.47

⁴⁹Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h.173-174

⁵⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.598

⁵¹*Ibid*, h. 49

diistilahkan dengan *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan *'an taradin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersimpan di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat.

b. Sunnah

Sunnah merupakan istilah *syara'* yang merupakan sesuatu dari Rasulullah saw. Baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (*taqrir*).⁵² Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.⁵³ Umat Islam telah sepakat bahwasanya apa yang keluar dari Rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan dan atau hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum Islam dan sebagai tuntutan. Serta diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang *shahih* yang menunjukkan kepastian atau dugaan yang kuat tentang kebenarannya, maka ia menjadi *hujjah* atas kaum muslim.⁵⁴

Dalam hadis Rasulullah saw. juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadis Rasulullah yang menyatakan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزْزَارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ⁵⁵

⁵²Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj: Faizel Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h.18

⁵³Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 156

⁵⁴Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h.42

⁵⁵Muhammad Ismail Al-Kahlani, "*Subul Al-Salam*" Juz 3, (Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy. cet. IV, 1960), h.4

Artinya: "Dari Rifah bin Rafi' bahwasannya Nabi saw. ditanya: "apa mata pencaharian yang lebih baik?" Jawab Nabi saw., seseorang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik-baik." (HR. Bazzar disahkan oleh Hakim)

Dalam hadis lain Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه أبو ماج) ⁵⁶

Artinya: "Dari Daud bin Shalihin al-Madanya dari ayahnya berkata, Saya mendengar ayah Said Khaldri berkata, Rasulullah saw. bersabda jual beli itu harus sama sama suka". (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadis-hadis di atas, dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain, jual beli merupakan pekerjaan yang paling baik, dengan ketentuan bahwa dalam transaksi jual beli harus disertai dengan kejujuran tanpa kecurangan, amanah dan juga saling ridha.

c. Ijma'

Ijma' diartikan kesepakatan (*al-ittifaq*) terhadap sesuatu. Secara terminologis, ijma' adalah kesepakatan semua *Mujtahid* dari ijma' umat Nabi Muhammad saw. dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'.⁵⁷ Ijma' merupakan sumber hukum ketiga, setelah Al-Qur'an dan sunnah.

⁵⁶Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah*, Juz II, (Beirut: Darul Fikr, 1972), h. 1737

⁵⁷Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, h.165

Terkait jual beli dan penerapannya, umat Islam sepakat bahwa hal tersebut sudah berlaku sejak zaman Rasulullah saw hingga saat ini.⁵⁸ Dengan demikian tidak diperselisihkan boleh tidaknya dikalangan kaum Muslimin, hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran atau ijtihad di kalangan umat Islam.⁵⁹

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)."⁶⁰

Ulama telah sepakat mengenai dasar hukum jual beli dalam ijma', bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa adanya bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁶¹

Akan tetapi pada situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi, pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Apabila seseorang melakukan *ikhtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga yang ditimbun dan di samping itu, maka menurutnya pihak Pemerintah boleh memaksa

⁵⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, (terj)*, Ahli Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid XII, (Bandung: Al-Ma'arif) h.48

⁵⁹*Ibid*, h.127

⁶⁰Abdul Mujieb, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia,2001), h. 25.

⁶¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam(Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.118

pedagang untuk menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.⁶²

Hukum dalam jual beli dapat menjadi haram, makruh, sunnah, dan wajib, atas dasar ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hukum jual beli menjadi haram, apabila memperjual belikan sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*.
- 2) Hukum jual beli menjadi makruh, apabila jual beli dilakukan pada waktu datangnya panggilan adzan sholat jum'at.⁶³
- 3) Hukum jual beli menjadi sunnah, apabila seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka yang melaksanakan yang demikian itu sunnah.
- 4) Hukum jual beli menjadi wajib, apabila menjual merupakan keharusan yang dilakukan, misalnya menjual barang karena untuk membayar utang.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan tidak mengikuti ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan atau tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan.

Para Ulama dan seluruh umat Islam telah menyepakati tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini pada umumnya sangat dibutuhkan oleh manusia yang dalam kenyataan kehidupan sehari-harinya tidak semua orang

⁶²Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafakat Fi Ushul Asy-Syari'ah*, Jilid II (Dar Al-Ma'rifah, 1975), h.56

⁶³Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h.144

memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang menjadi kebutuhannya kadang berada di tangan orang lain. Maka dengan jalan jual beli, manusia bisa saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian roda perekonomian akan berjalan dengan positif karena apa yang dilakukan keduanya saling menguntungkan untuk kedua belah pihak.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dipandang sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para Ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja, menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).⁶⁴

Jumhur Ulama sepakat bahwa jual beli harus memenuhi 3 rukun, yaitu:

⁶⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h.118

1) *Aqidain* (Orang yang berakad)

- a) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah *mukallaf*, artinya cakap dalam melakukan transaksi jual beli .
- b) Pembeli, yaitu pemilik harta yang membeli barang tertentu atau seseorang yang memiliki kecakapan untuk membelanjakan hartanya (uangnya).⁶⁵

2) *Sighat* (*Ijab dan qabul*)

Sighat (*ijab dan qabul*) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang secara lisan maupun tulisan.

3) *Mauqud alaih* (Ada barang yang dibeli)

Mauqud alaih atau objek jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*) dan sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara'* untuk dijual dan diketahui sifatnya dalam jual beli.⁶⁶

b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah atau tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukan

⁶⁵Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, h.141

⁶⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), h.186

untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah. Jumhur Ulama berpendapat bahwa syarat jual beli, yaitu:

1. Syarat *Aqidain* (Orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli. Transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa adanya kedua belah pihak. Adakalanya seseorang yang berakad adalah wakil dari yang memiliki hak. Ulama Fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a) *Baligh* dan berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, hukumnya tidak sah. Jumhur Ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah *aqil baligh* dan berakal.⁶⁷ Baligh menurut hukum Islam (*fiqh*), yaitu seseorang yang sudah dewasa atau apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haid*) bagi anak perempuan. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian Ulama anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli,

⁶⁷Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 No.2 (Desember 2015), h.249

khususnya barang-barang kecil dan tidak bernilai. Jual beli juga hendaknya dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat, jual beli yang dilakukan oleh orang gila, mabuk atau pingsan, tidak sah dan haram. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ...

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya.." ⁶⁸

Isi kandungan di atas menjelaskan bahwa janganlah menyerahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, yang tidak bisa mengatur harta benda yang menjadi hak milik mereka.

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli, salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli karena kerelaan dan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kerelaan atau kehendaknya sendiri adalah tidak sah. ⁶⁹

⁶⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* ..., h. 115

⁶⁹Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ..., h. 142

c) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.⁷⁰

d) Keduanya tidak *mubazzir*, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazzir*) sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.⁷¹ Orang pemboros apabila melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah. Sebab, orang-orang yang melakukan pemborosan itu suka menghamburkan hartanya.⁷²

2) Syarat *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

Sighat (*ijab* dan *qabul*) adalah persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual meenyerahkan barang, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Ulama *fiqih* sepakat berpendapat, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad itu

⁷⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)...*, h.120

⁷¹Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, h. 143

⁷²Muhammad Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, Cet. Ke-22, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1982M-1402H), h. 151

berlangsung. *Ijab qabul* harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.⁷³ Ulama *fiqh* menyatakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah *akil baligh* dan berakal
 - b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Contohnya: "saya jual rumah ini dengan harga seratus juta rupiah" lalu pembeli menjawab "saya beli dengan harga seratus juta rupiah".
 - c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dalam satu majelis dan membicarakan hal yang sama.⁷⁴
 - d) Janganlah selingi kata-kata yang lain diantara *ijab* dan *qabul*.⁷⁵
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan, adalah sebagai berikut:⁷⁶
- a) Suci barangnya
- Artinya barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang termasuk dalam kategori barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh syara'. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak sah jual beli barang najis seperti babi, anjing, dan *khamar* (minuman keras). Tetapi sebagian ulama Malikiyah

⁷³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h.120

⁷⁴*Ibid*, h.120-121

⁷⁵Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 148

⁷⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h. 123-

membolehkan jual beli anjing yang dipergunakan untuk berburu, menjaga rumah, dan perkebunan.⁷⁷

Menurut Mazhab Hanafi dan Zahiri, semua barang yang memiliki nilai manfaat dikategorikan halal untuk dijual. Untuk itu mereka berpendapat bahwa boleh menjual kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan penggunaannya untuk keperluan perkebunan dan dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Demikian pula diperbolehkan menjual setiap barang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum.⁷⁸

b) Barang itu ada di tempat atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, umpamanya barang itu ada pada sebuah toko atau pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Sebab tidak semua barang yang dijual berada di Toko atau dikirim dari pabrik, mungkin karena tempatnya sempit atau alasan-alasan lainnya.

c) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat untuk manusia, oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.

⁷⁷Muhammad Yunus, *Tafsir Qu'an Karim*, Cet. Ke-22, h. 133

⁷⁸Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2009), h.

d) Barang tersebut adalah milik seseorang, karena barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, maka barang itu tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, atau emas dalam tanah. Karena ikan dan emas tersebut belum dimiliki oleh penjual.

e) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar harga barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang, nilai tukar tersebut disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, Ulama fiqih membedakan antara *at-tsaman* dan *as-sir*. Menurut mereka *as-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-sir* adalah modal kepada konsumen, dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dimainkan pedagang adalah *ats-tsaman* bukan *as-sir*. Ulama fiqih mengemukakan syarat *ats-tsaman* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi) sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu

pembayarannya pun harus jelas waktunya. Apabila jual beli itu dilakukan secara *barter*, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukanlah barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

B. Hadiah

1. Pengertian Hadiah

Hadiah berasal dari kata *Hadi* (هَدَى) terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *ha*, *dal*, dan *ya*. Maknanya berkisar pada dua hal:

1. Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang pada umumnya diberikan kepada penerima untuk memuliakannya.⁷⁹
2. Dalam artian lain hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan mengagungkan atau rasa cinta.⁸⁰

Secara sederhana hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.⁸¹ Pemberian dalam bahasa Arab disebut *Al-hibah*. Kata *hibah* adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* yang digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya

⁷⁹Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'I, *Asnal Mathalib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz 5), h. 566

⁸⁰Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 241.

⁸¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 211

memberi dan jika subjeknya Allah berarti memberi karunia atau memengaruhi.⁸²

Secara bahasa, *hibah* berasal dari kata *wahaba – yahabu – hibatan*, berarti memberi atau pemberian. Dalam Kamus al-Munawwir kata “*hibah*” ini merupakan mashdar dari kata **وَهَبَ** yang berarti pemberian.⁸³

Demikian pula dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *hibah* berarti pemberian sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.⁸⁴ Menurut *Kamus Ilmu Al-Qur'an* yang dimaksud *hibah* adalah pemberian kepada seseorang diwaktu hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan maupun tulisan.⁸⁵

Hibah merupakan pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian atau balasan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayat al-akhyar*⁸⁶ bahwa *hibah* adalah:

التَّمْلِيكَ بِغَيْرِ عَوَضٍ

Artinya: ”Pemilikan tanpa penggantian”

Sedangkan Jumhur Ulama mendefinisikan *hibah* sebagaimana dikutip dari Nasrun Haroen, yaitu:

⁸²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.466

⁸³Ahmad Warson Munawwir AF, *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1584.

⁸⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 398.

⁸⁵Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2006, cet.2), h. 99.

⁸⁶Taqiy al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, *Kifayat al-Khiyar*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2007), h. 323.

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعا

Artinya: "Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela."⁸⁷

Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya harta kepemilikan dari pemberi kepada orang yang diberi.

Menurut istilah *fiqh*, hadiah didefinisikan sebagai berikut:

1. Menurut Zakariyya Al-Anshari

(الْهَدِيَّةُ وَهِيَ) تَمْلِكُ (مَا يُحْمَلُ) أَيُّ يُبْعَثُ (غَالِبًا) بِلَا عَوَضٍ إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ (إِكْرَامًا)

Artinya: "Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya."⁸⁸

2. Menurut Sayyid Sabiq

الْهَدِيَّةُ كَالْهَبَّةِ حُكْمًا وَمَعْنَى

Artinya: "Hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya"⁸⁹

Dalam hal ini Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan *hibah* dari segi maknanya. Menurutnya, *hibah* dan hadiah adalah dua istilah dengan satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi *hibah*, berlaku juga bagi hadiah.

⁸⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 82.

⁸⁸Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asnal Mathalib*, h.566

⁸⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, juz III), h. 315.

3. Menurut Muhammad Qal'aji

الْهَدِيَّةُ هِيَ إِعْطَاءُ شَيْءٍ بِغَيْرِ عَوَضٍ صِلَةٍ وَتَقَرُّبًا وَإِكْرَامًا

Artinya: "Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan."⁹⁰

Dalam pengertian ini, Muhammad Qal'aji menegaskan bahwa dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun adakalanya ada tujuan tertentu yaitu untuk menyambung tali silaturahmi dan mendekatkan hubungan, dan memuliakan.

Mayoritas *Fuqaha* cenderung membedakan antara *hibah* dan hadiah, yang jelas hadiah merupakan pemindahan kepemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya saja. Kalau yang diberikan adalah manfaatnya sementara zatnya tidak maka itu merupakan pinjaman (*al-ijarah*). Karena hadiah haruslah merupakan *tamlikan li al-'ayn* (pemindahan/penyerahan kepemilikan atas suatu harta kepada pihak lain). Penyerahan kepemilikan itu harus dilakukan semasa hidup karena jika sesudah mati maka merupakan wasiat. Di samping itu penyerahan kepemilikan yang merupakan hadiah itu harus tanpa kompensasi (*tamlikan li al-'ayn bi la iwadh*), karena jika dengan kompensasi maka bukan hadiah melainkan jual beli (*al-bay*).

⁹⁰Muhammad Qal'aji, *Mu'jam Lugatil Fuqaha* dalam al-Maktabah asy-syamilah, al-ishtar ats-tsani, juz 1, h. 493 atau www.shamela.ws, diakses pada 24 juni 2019

2. Dasar Hukum Hadiah

a. Al-Qur'an

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۝ ٣٥ فَلَمَّا جَاءَ
سُلَيْمَنُ قَالَ أَتَمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ
تَفْرَحُونَ ۝ ٣٦

Artinya : "Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu." Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman. Sulaiman berkata : "apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." (Q.S. An-Naml (27) ayat 35-36)⁹¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa dahulu para raja mengirimkan utusannya dengan membawakan hadiah yang ditujukan untuk diberikan kepada Sulaiman dengan maksud membujuk Sulaiman agar membiarkan mereka tetap melakukan kemusyrikan, tetapi Sulaiman menolak dengan mengatakan kepada utusan tersebut bahwa sesungguhnya apa yang diberikan Allah kepadanya berupa kenabian, kerajaan yang luas, dan harta yang banyak, lebih baik dibandingkan dengan apa yang mereka miliki.⁹²

Berdasarkan ayat ini, maka kita tidak diperbolehkan menerima pemberian (hadiah) dari seseorang jika diketahui bahwa yang memberikan hadiah tersebut memiliki tujuan atau maksud yang tidak baik. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Maidah (5) ayat 2 :

⁹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 303

⁹²Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi 19*, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 256

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: "...Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan (kebajikan) dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."⁹³

b. Hadis

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تها دواتحا بّوا.
(رواه البخاري في الأدب المفرد, وأبو يعلى با سناد حسن)⁹⁴

Artinya : "Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. Bersabda, "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, agar kalian saling mencintai." (HR. al-Bukhari dalam kitab al-Adab al-Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad hasan).

Dapat disimpulkan, baik ayat maupun hadis di atas, menurut Jumhur Ulama hal tersebut menunjukan (anjuan) untuk saling membantu dengan jalan menghibahkan atau memberi dalam bentuk hadiah. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang memiliki kelebihan harta untuk mau menghibahkan atau memberikan hartanya kepada yang membutuhkan juga agar saling mencintai, mengeratkan silaturahmi, dan menghilangkan kedengkian.⁹⁵

Adapun hadiah yang sudah diberikan, haram untuk ditarik atau diminta kembali. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis:

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ) حَدَّثَنَا سَنَارَوْحُ (وَحُوبُ الْقَاسِمِ) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عُمَرَ. أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَوَرَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَدْ أَضَاعَهُ. وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ. فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيَهُ. فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ لَا : لَا

⁹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 85

⁹⁴Muhammad bin Isma'il Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Isnain, "Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram", (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), h.555

⁹⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2000), h.324

تَشْتَرِهِ. وَإِنْ أُعْطِيَتْهُ بِدِرْهَمٍ. فَإِنَّ مَثَلَ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ. كَمَثَلِ كَلْبٍ يَعُودُ
فَقِيَّتُهُ⁹⁶

Artinya: "Diriwayatkan dari Umayyah bin Bistoma. Diriwayatkan Yasid (Ibnu Zura'i), diriwayatkan dari Rohwun yakni Ibnu Qasim dari Said Bin Aslam dari Abi, dari Umar r.a. Katanya, saya pernah mendermakan kuda fisabilillah yang kemudian saya lihat kuda itu disia-siakan pemiliknya yang miskin. Maka Umar ingin membelinya lagi. Setelah bertanya kepada Rasulullah Saw tentang hal itu, beliau berkata: janganlah kamu membeli itu walaupun akan dijual padamu sedirham: karena perumpamaan orang yang menarik kembali pemberiannya atau sedekahnya, ibarat seperti anjing yang makan muntahannya."

3. Rukun Hadiah

Sebelum membahas lebih jauh tentang rukun dan syarat hadiah, maka perlulah kiranya untuk mengetahui terlebih dahulu pengertian dari rukun dan syarat itu sendiri, baik secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.⁹⁷ Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.⁹⁸

Secara terminologi, dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.

Sedangkan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu

⁹⁶Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Terjemahan Al-Lu'lu Wal Marjan Koleksi Haidis yang Disepakati Al-Bukhari dan Muslim, Jilid II*, (Semarang: Al-Ridha, 1993)

⁹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.966

⁹⁸Abdul Aziz Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h 1510

mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu mesti pula adanya hukum.⁹⁹

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama *ushul fiqh*, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri.¹⁰⁰

Menurut Ulama Hanafiyah sendiri, rukun hadiah adalah ijab dan qabul sebab hadiah seperti halnya akad jual beli, hanya saja ada penambahan dengan adanya *qadbhu* (pemegang/penerima) dengan alasan dalam hadiah harus ada ketetapan dalam kepemilikan.¹⁰¹

Jumhur Ulama mengemukakan bahwa rukun hadiah terdiri dari 4, yaitu:

1. Pemberi hadiah (*al-muhdi*)

Yaitu orang yang memberikan hadiah atau orang yang melakukan pemindahan kepemilikan dari dirinya untuk orang lain atau orang yang menghadiahkan barang yang dimilikinya kepada orang lain. *al-muhdi* (pemberi hadiah) haruslah orang yang mampu melakukan *tasharruf*, seseorang yang menghadiahi atau memberikan hadiah dengan kehendaknya sendiri bukan dengan paksaan, dan ia mestilah pemilik sempurna atas suatu benda yang ia hadiahkan.

h.50 ⁹⁹Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),

¹⁰⁰*Ibid*, h.1692

¹⁰¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.244

2. Penerima hadiah (*al-muhdah ilayh*)

Yaitu orang yang menerima pemberian hadiah, yang diharuskan benar-benar ada pada saat akad. Ia tidak diharuskan mampu melakukan *tasharruf*, juga tidak diharuskan baigh dan berakal, kalau sekiranya *mauhub alaih* adalah anak kecil maka penerimaan hadiahnya dapat diwakili oleh wali atau *mushinya*.

3. Harta yang dihadiahkan (*al-muhda*)

Yaitu sesuatu atau harta kepemilikan *al-muhdi* yang dihadiahkan, yang *ma'lum* (jelas), yang halal diperjualbelikan dan berada di tangan *al-muhdi* atau bisa ia serahterimakan kepada penerima hadiah pada saat akad. Hadiah tersebut haruslah sudah ada (berwujud) karena tidaklah sah apabila menghadiahkan sesuatu yang belum berwujud, juga mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama dan mestilah telah terpisah secara jelas dari harta yang dimiliki oleh *al-muhdi*.

4. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

Sighat ialah kata-kata yang diucapkan oleh *al-aqidain* (orang yang berakad). *Ijab* adalah kata-kata yang diucapkan oleh pemberi hadiah (*al-muhdi*), sedangkan *qabul* diucapkan oleh orang yang menerima pemberian hadiah.

Contoh *sighat* hadiah ialah, si A berkata kepada si B : "Aku berikan hadiah kepadamu sebuah handphone, kemudian si B menjawab : "Aku terima pemberian hadiah ini". Maka, sejak saat inilah handphone milik A berubah kepemilikan menjadi milik B.

4. Syarat Hadiah

Syarat berasal dari makna janji. Menurut istilah *syara'* ialah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu.¹⁰² Dalam jual beli, terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah atau tidaknya akad tersebut. Adapun yang menjadi syarat dalam pemberian hadiah yaitu : berkaitan dengan syarat *al-muhdi* (si pemberi hadiah) dan *muhda* (barang atau harta yang dihadiahkan). Ulama Hanabilah menetapkan 11 (sebelas) syarat diantaranya¹⁰³:

1. Hadiah dari harta yang boleh ditasharrufkan
2. Terpilih dan sungguh-sungguh
3. Harta yang diperjual belikan
4. Tanpa adanya pengganti.
5. Orang yang sah memilikinya
6. Orang yang sah menerimanya
7. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu (umur)
8. Menyempurnakan pemberian
9. Tidak disertai syarat waktu
10. Pemberi sudah mampu *tasharruf* (merdeka, *mukallaf*, dan *rashid*)
11. *Mauhub* harus berupa harta yang khusus dikeluarkan

Jumhur Ulama berpendapat bahwa syarat hadiah ada 4, yaitu:

¹⁰²M. Abdul Mujieb, Mabruhi Thalbah, Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h.301

¹⁰³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.161

1. Syarat *al-muhdi* (pemberi hadiah), yaitu:
 - a. Orang yang layak melakukan *tasharruf*, maksudnya ialah ia telah *mursyid*, ia telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terjadi suatu persoalan yang berhubungan dengan harta kepemilikannya itu.
 - b. Ia adalah pemilik sempurna atas sesuatu yang dihadihkannya.
 - c. Cakap bertindak hukum, yaitu *baligh*, berakal dan *Rasyid* (pintar).
 - d. Memberikan hadiah atas kehendaknya sendiri, bukan karena dipaksa, atau suatu keadaan sehingga ia tidak dapat bertindak menurut kehendaknya seperti dalam keadaan mabuk dan sebagainya.
2. Syarat *al-muhdah ilayh* (penerima hadiah), yaitu:
 - a. Hadir pada saat pemberian hadiah.
 - b. Ia tidak harus orang yang layak melakukan *tasharruf* saat akad hadiah tersebut, jika *al-muhdah ilayh* masih kecil atau gila, maka penerimaan hadiah diwakili oleh wali atau *mushinya*.
3. Syarat *al-muhda* (harta yang dihadihkan), yaitu:
 - a. Harta atau barang tersebut ada dan jelas (*ma'lum*) ketika akad hadiah dilaksanakan.
 - b. Harus milik *al-muhdi* (pemberi hadiah).
 - c. Harta atau barang tersebut halal diperjualbelikan dan bermanfaat.
 - d. Harta atau barang tersebut berada di tangan *al-muhdi* atau bisa langsung ia serah terimakan saat akad.

e. Dikhususkan, yaitu barang yang dihadiahkan bukan milik umum, sebab kepemilikan tidak sah kecuali apabila ditentukan seperti halnya jaminan.¹⁰⁴

4. Syarat *sighat* (*ijab* dan *qabul*), yaitu :

- a. Sesuai antara *qabul* dengan *ijab*nya.
- b. Akad hadiah tidak dikaitkan dengan sesuatu, seperti perkataan: "Aku hibahkan barang ini padamu, jika si *fulan* datang dari Mekah."¹⁰⁵
- c. Bagi orang bisu, *ijab* dan *qabul* bisa berupa bahasa isyarat, asalkan antara penerima dan pemberi terdapat kesamaan pemahaman yang mengandung transaksi hadiah.

Mengenai *ijab* dan *qabul* yaitu adanya pernyataan, bisa saja dapat berupa lisan maupun tulisan. Sedangkan menurut ulama Hanafi, beliau berpendapat bahwa *ijab* saja sudah cukup tanpa diikuti dengan *qabul*, dengan perkataan lain hanya berbentuk pernyataan sepihak.¹⁰⁶

5. Macam-Macam Hadiah

Hadiah ada berbagai macam dan jenis, diantaranya ada yang syari'atkan, ada yang disunnahkan, dan ada yang diharamkan. Macam-macam hadiah tersebut yaitu:

- a. Hadiah dalam perlombaan

¹⁰⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Juz III*, h.317

¹⁰⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 139

¹⁰⁶Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.116

Dalam hal ini, hadiah yang dimaksud adalah hadiah yang diberikan atas dasar perlombaan yang bersifat adu kekuatan seperti gulat, tinju atau lomba lari atau adu keterampilan/ketangkasan seperti badminton, sepakbola, atau kepandaian seperti main catur, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya lomba semacam tersebut diperbolehkan dalam agama, asal tidak membahayakan keselamatan jiwa dan raganya. Dalam hal mengenai hadiah berupa uang yang diperoleh dari hasil lomba tersebut, diperbolehkan oleh agama jika dalam syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jika uang/hadiah perlombaan itu disediakan oleh Pemerintah atau sponsor non-Pemerintah untuk para pemenang.
- 2) Jika uang/hadiah itu sebagai janji dari salah satu pihak dari dua orang yang berlomba jika lawannya dapat mengalahkannya dalam perlombaan itu.¹⁰⁷
- 3) Jika uang/hadiah lomba disediakan oleh para peserta lomba disertai dengan *muhallil*, yaitu orang yang fungsinya menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah dari perlombaan itu jika jagoannya menang, tetapi jika kalah, ia tidak harus membayarnya.¹⁰⁸

b. Hadiah dalam pembelian suatu barang

¹⁰⁷Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1991), h. 150

¹⁰⁸Nazar Bakry, *Problematika Fiqh Islam, Cet. I, Edisi I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h.86

Pemberian hadiah dalam pembelian suatu barang merupakan sebuah bentuk yang diharamkan, jika orang tersebut membeli kupon dengan harga tertentu, sedikit atau banyak, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan. Sama halnya jika pembeli tersebut membeli dengan tujuan untuk mendapatkan kupon, sedangkan ia tidak membutuhkan barangnya maka hukumnya haram, karena kupon dalam hal ini adalah sebagai tujuan pembelian dan bukan sebagai pengikut.¹⁰⁹ Bahkan hal yang seperti ini merupakan larangan yang serius (yang dianggap dosa besar jika melakukannya). Karena perbuatan yang seperti ini termasuk perbuatan judi yang dalam Al-Qur'an disebutkan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. Al-Maidah (5) ayat 90)¹¹⁰

c. Hadiah sebagai suap atau sogokan

Dalam hal ini Umar bin 'Abdul 'Aziz menyatakan bahwa pada masa Rasulullah, hadiah adalah hadiah. Namun pada masa ini, hadiah bisa saja diartikan sebagai suap atau sogokan, untuk

¹⁰⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), h.370.

¹¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 97

menghindari kesalah artian antara hadiah dan suap atau sogokan, maka perlu diketahui bagaimana Islam mengatur tentang hadiah.

Dalam sebuah hadis dikatakan:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهْدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مَعَهُمْ¹¹¹

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin al-Mundzir telah menceritakan kepada kami Ma'an berkata, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Thoman dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah r.a berkata: "adalah Rasulullah saw. Apabila diberikan makanan, Beliau bertanya tentangnya, "apakah ini sebagai hadiah atau shadaqoh?". Jika dijawab shodaqah, maka Beliau tidak ikut makan." Namun bila dikatakan hadiah, maka Beliau mengeluarkan tangan Beliau lalu makan bersama mereka." (HR. Bukhari)

Ketentuan hadis di atas memberikan aturan agar penerima hadiah tidak hanya bahagia atau senang dengan hadiah yang bakal diterima, akan tetapi selalu mengidentifikasi hadiah yang diterimanya tersebut apakah termasuk yang boleh diterima atau tidak.

d. Hadiah orang tua kepada anaknya

Dalam hal ini hadiah dikategorikan sebagai rasa cinta yang ditanamkan kepada anak-anak, namun hadiah tersebut harus diberikan secara adil kecuali apabila ada hal-hal khusus yang harus mengutamakan salah satu diantaranya, maka ini tidak mengapa. Seperti halnya apabila salah satu anaknya sakit, memperoleh nilai

¹¹¹al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab Hibah No. 2388, (Semarang: Thoha Putra, 1999), h.984

terbaik disekolahnya, ingin menikah, anak tertua membantu perekonomian keluarga dan pendidikan saudara-saudaranya, dan lain sebagainya yang semacam itu dari faktor-faktor dan sebab-sebab yang ada. Namun menurut kebanyakan para Ulama dan Mazhab Imam Ahmad, al-Bukhari, Ishaq, ats-Tsauri, Daud, dan Ibnu Taimiyah, apabila tidak didapati sebab-sebab pengkhususan maka yang wajib adalah tetap berbuat adil dan sama rata dalam pemberian hadiah kepada mereka.

e. Hadiah lamaran

Hadiah ini merupakan pemberian dari salah satu pihak, baik yang berbentuk barang habis pakai maupun tidak. Adapun apabila hadiah tersebut dalam bentuk barang habis pakai, maka hadiah ini tidak dikembalikan, tidak diminta nilainya, atau diganti ketika terjadi perceraian. Menurut Ulama Hanafiyah, peminang boleh meminta kembali hadiah yang diberikannya apabila hadiah tersebut masih ada dan belum rusak, jika barang tersebut rusak maka peminang tidak berhak meminta kembali. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa bagi orang yang membatalkan pinangannya tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan, baik hadiah tersebut masih ada ataupun tidak, yang berhak meminta kembali hadiah adalah pihak yang tidak menggagalkan peminangan itu. Pendapat ini lebih rasio dan logis karena pembatalan peminangan itu berarti menyakiti dan mencela

wanita terpinang. Layaknya wanita ini jangan dibebani dua beban, yakni sakitnya dipisah dan tuntutan pengembalian hadiah.¹¹²

6. Hikmah Hadiah

Allah Swt. dan Rasul-Nya menganjurkan umatnya untuk berkasih sayang dan saling membantu, salah satunya dengan cara memberikan hadiah. Hikmah atau manfaat disyari'atkannya adalah sebagai berikut:

- a. Memberi hadiah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang dapat merusak nilai-nilai keimanan di dalam hati. Hadiah dilakukan sebagai penawar racun hati yaitu dengki. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Tirmidzi dari Abi Hurairah r.a Nabi saw. bersabda:

نَهَادُ وَإِنَّا الْهَدِيَّةُ تُذْهِبُ وَحَرَّاصْدَرِ¹¹³

Artinya: "Beri-memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki)."

- b. Pemberian hadiah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, menyayangi dan mencintai. Abu Ya'la telah meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah bahwa Nabi bersabda:

تَهَادُوا تَحَابُّوا¹¹⁴

Artinya: "Saling memberi hadiahlah kamu, karena dapat menumbuhkan kasih sayang."

- c. Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam, dalam sebuah hadis dari Anas r.a Rasulullah saw bersabda:

¹¹²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h.31

¹¹³Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Mesir : Dar Ibnu Hisyam, 2002), Jilid ke-2 h. 214

¹¹⁴*Ibid*

تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسْلُ السَّخِيمَةَ¹¹⁵

Artinya: "Saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam."

C. Jual Beli Disertai Hadiah

Jual beli disertai hadiah merupakan strategi promosi dimana penjual memberikan hadiah kepada pembeli baik secara langsung, diundi, melalui kuis, ataupun melalui poin yang dikumpulkan atas transaksi jual beli yang dilakukan. Para ulama kontemporer dalam menghukumi jual beli disertai dengan hadiah ini membaginya dalam dua pendapat, ada yang mengharamkannya secara keseluruhan dan ada yang menghukuminya dengan menelitinya satu persatu bentuk dan metode pedagang dalam memberikan hadiah.¹¹⁶

Syaikh Bin Baz, Ibnu Jibrin, Dr. Hisamuddin Affani, dan Muhammad bin Abdillah asy-Syabani. Kelompok Ulama ini mengharamkan secara keseluruhan pemberian hadiah jenis ini dengan dalil beberapa alasan sebagai berikut:

1. Metode pemberian hadiah ini adalah dengan akad *muawadhah*, bukan merupakan akad *tabaru'at*. Maka ini menjadi akad yang fasid.

¹¹⁵Muhammad bin Isma'il al-Amir ash-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarah Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Isnain, "Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram".) Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), h. 554

¹¹⁶Said Wajih Said Mansur, *Ahkamul Hadiah Fi al-Fiqh al-Islami*, dalam al-Maktabah asy-Syamilah, h.146 atau www.shamela.ws diakses pada 24 juni 2019

2. Pemberian hadiah dengan cara seperti ini memakan harta manusia dengan cara yang bathil. Konsumen merasa tertarik untuk membeli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, dan hanya sekedar menginginkan hadiahnya semata. Disamping itu pula praktik pemberian hadiah seperti ini menjadi kesempatan bagi penjual untuk menaikkan harga produk. Metode ini sama halnya dengan cara orang Barat dalam berdagang. Mereka hanya memikirkan bagaimana mendapat laba sebanyak-banyaknya dan tidak adanya aturan tertentu yang mengikat cara berdagang mereka, sehingga cara tersebut dapat menyerupai praktik monopoli dan perjudian.¹¹⁷
3. Praktik pemberian hadiah seperti ini dapat merugikan pedagang lain yang tidak mampu melakukannya, padahal Rasulullah Saw bersabda “*Janganlah memberi bahaya atau membalas bahaya dengan bahaya lainnya.*” (HR. Darul Quthni)

Adapun kelompok Ulama yang menghukumi praktik pemberian hadiah seperti ini dengan meneliti satu persatu bentuk dan metode pedagang dalam memberikan hadiah ialah Syaikh Ibnu Utsaimin dan Lajnah Daimah Li Ifta`. Kelompok Ulama ini melandaskan pendapatnya dengan menanggapi

¹¹⁷Yusuf Qardhawi, *Fatawa Muashirah*, vol. II, h. 392. Atau www.shamela.ws diakses pada 24 juni 2019

alasan yang dikemukakan kelompok Ulama yang mengharamkan secara keseluruhan, sebagai berikut:¹¹⁸

1. Para pedagang menjadikan hadiah sebagai pemberian dalam jual beli sangatlah beragam, sehingga tidak dapat dihukumi semuanya sebagai akad *mu'awadhah*, ada yang memang benar begitu dan adapula yang murni *hibah*, *tabrru'*, dan juga sebagai akad pengikut.
2. Praktik pemberian hadiah seperti ini tidaklah memakan harta dengan bathil, hal ini dikembalikan kepada pembeli dan seberapa butuhnya dengan barang tersebut. Harga barang yang diperjualbelikan haruslah sesuai dengan harga pasaran, sehingga pembelipun akan merasa senang berbelanja tanpa hanya sekedar menginginkan hadiahnya saja, melainkan memang menjadi kebutuhannya. Jika harga barang menjadi tinggi akibat adanya praktik pemberian hadiah ini, maka hal seperti ini benar menyurupai praktik judi.
3. Islam memiliki kaidah dan *ushul* yang jelas dan relevan untuk perkembangan zaman, dalam hal ini terkadang konsep orang Barat juga dibutuhkan oleh manusia, maka umat Islam diperbolehkan mengambil konsep ini selama tidak bertentangan dengan kaidah *syar'i*. Ibnu Taimiyah berkata, “*Dan hukum asal dari masalah ini yaitu tidak diharamkan*

¹¹⁸Said Wajih Said Manshur, *Ahkamul Hadiah Fi al-Fiqh al-Islami*, h. 145.

bagi manusia terhadap muamalat yang banyak dibutuhkan, selama tidak ada dalil dari al-Qur`an dan as-Sunnah yang mengharamkannya.”

4. Pedagang yang berusaha menambah tinggi omsetnya dengan memberikan hadiah atau dengan metode lainnya pastilah akan memperbaiki dan membangun perekonomian negara. Maka pedagang yang tidak dapat melakukan metode ini dilarang untuk mengharamkan metode berdagang ini, tetapi hendaknya berinovasi dengan metode lainnya yang sesuai dengan kemampuannya. Karena, pelarangan ini dapat menghilangkan maslahat umum untuk umat yaitu terbangunnya perekonomian umat. Ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*,

الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام

“Kemudharatan yang bersifat khusus dibebankan demi mengangkat kemudharatan bagi khalayak ramai.”¹¹⁹

1. Syarat Jual Beli Disertai Hadiah

Meskipun demikian, praktik jual beli disertai dengan hadiah ini haruslah memenuhi syarat, yaitu:¹²⁰

- a. Metode pemberian ini haruslah terlepas dari unsur haram. Baik benda yang diperjualbelikan, maupun benda yang dijadikan hadiah.

¹¹⁹Ahmad bin Muhammad az-Zarqa`, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Versi Syameela), (Dar Qalam, 1989)

¹²⁰Muhammad Sulaeman Jajuli, *Fiqh Madzhab 'Ala Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), h. 128

- b. Hadiahnya tidak mengandung unsur judi, dalam artian pemberian hadiah ini murni karena strategi promosi penjualan dan bersifat cuma-cuma, bukan berasal dari penambahan harga barang yang dijual kepada pembeli. Sehingga, pembeli yang tidak beruntung mendapatkan hadiah, tidak merasa dirugikan.
- c. Jual beli tersebut terbebas dari riba.
- d. Apabila hadiah diberikan dengan cara diundi, maka hadiah tersebut haruslah murni dari penjual, bukan dari harga barang yang dinaikan, ataupun dengan syarat membeli kupon. Sebab, jika praktiknya seperti itu, maka praktik tersebut seperti halnya judi.¹²¹
- e. Tidak adanya kedzaliman diantara kedua belah pihak, baik dengan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil ataupun penipuan.
- f. Hendaknya tujuan pembeli berdasarkan barang yang dibutuhkannya, bukan tergiur karena hadiah yang akan diberikan, sehingga pembeli tidak melakukan perbuatan *mubazir* dengan menghamburkan uang untuk membeli sesuatu yang tidak dibutuhkannya. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Isra' (17) : 26-27

وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ
 إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ

Artinya: “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-

¹²¹Majid Ahmad Makki, *Fatawa az-Zarqa*, (Versi Syameela), h. 76

saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar pada Tuhannya.”¹²²

2. Hukum Jual Beli Disertai Hadiah

Ada dua macam hukum jual beli yang disertai hadiah, diantaranya sebagai berikut:¹²³

a. Jual beli disertai hadiah yang diperbolehkan, diantaranya yaitu:

- 1) Hadiah merupakan sesuatu yang diberikan kepada pembeli sebagai tambahan atas pembelian sejumlah barang.
- 2) Menyertakan hadiah dengan jelas di dalam barang tertentu yang juga diketahui jelas barangnya atau di dalamnya diletakan selebar tulisan hadiah dengan menyebutkan jenis hadiahnya, sehingga pembeli yang mendapatkannya dapat mengambilnya langsung lembaran hadiah tersebut kepada penjual. Boleh juga dalam bentuk snack ataupun makanan ringan yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk hadiah ataupun terdapat tulisan **"berhadiah jika beruntung"**, jual beli dengan pemberian hadiah seperti ini diperbolehkan, dengan syarat harga barang yang diperjualbelikan tidak naik dan pelanggan membelinya karena kebutuhan. Kalaupun di dalam snack atau makanan ringan yang dibelinya tidak terdapat hadiah, jual beli disertai hadiah seperti inipun dianggap sah atau diperbolehkan karena


¹²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.227

¹²³Hamdan Rasyid, Saiful Hadi el-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-Hari Dari Lahir Sampai Mati*, (Jakarta Selatan: Wahyu Qolbu, 2016), h. 598

pembeli sudah membayar harga snack atau makanan ringannya, dan penjual pun tidak terikat memberikan hadiah di snack ataupun makanan ringan tersebut.

3) Jual beli yang disertai kupon undian berhadiah dengan maksud untuk *shodaqoh*, dan hadiah tersebut tidak diambil dari hasil transaksi jual beli yang dilakukan dengan kupon tersebut. Menurut sebagian Ulama, jual beli disertai dengan hadiah seperti ini diperbolehkan.

4) Jual beli disertai hadiah dengan syarat nominal pembelian, hal seperti ini diperbolehkan apabila harga barang yang dijual oleh pedagang tersebut, sama halnya dengan harga barang yang dijual oleh pedagang lain yang tidak memberikan hadiah atas pembelian suatu barang, maka praktik seperti ini diperbolehkan.



5) *Doorprize*, yaitu pemberian hadiah yang biasanya dalam bentuk kode unik dalam kupon yang diberikan secara cuma-cuma oleh penjual kepada pembeli yang menjadi barang bukti untuk ditukarkan apabila kode unik dalam kupon pembeli keluar atau terpilih untuk mendapatkan hadiah.

Jual beli suatu apapun yang disertai dengan hadiah, baik diberikan secara langsung maupun diundi dengan tujuan sebagai strategi promosi agar pembeli tertarik untuk berbelanja dan membeli produk-produk yang ditawarkan, hukumnya sah atau

diperbolehkan, sebab hadiah tersebut merupakan tambahan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli dengan syarat:¹²⁴

- a) Hadiah yang diberikan haruslah halal, mempunyai nilai manfaat dan sesuai dengan yang telah dijanjikan.
 - b) Hadiahnya tidak boleh mengandung unsur judi.
 - c) Harga barang yang diperjualbelikan tidak naik.
- b. Jual beli disertai hadiah yang tidak diperbolehkan, diantaranya yaitu:

- 1) Menjual kotak yang tertutup yang tidak diketahui apa isi yang ada didalamnya. Kadang kotak tersebut kosong, kadang pula di dalamnya terdapat barang yang harganya di atas harga pembelian barang tersebut, atau bahkan kurang dari harga yang dibayarkan. Jual beli disertai hadiah yang seperti ini tidak diperbolehkan karena jual beli seperti ini bersifat manipulatif (*ba'i al-gharar*). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis :


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)¹²⁵

“Dari Abu Hurairah berkata: ‘Sesungguhnya Rasulullah melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli yang samar. (HR. Muslim)

¹²⁴Pengurus NU Jatim, *Hasil Keputusan Bahtsul Masail NU Wilayah Jatim*, (Surabaya: 1986), h. 191

¹²⁵Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, *Shahih Muslim* No. 1513, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), h.220

2) Barang yang dicantumkan sebuah nomor, lalu pemiliknya dikenakan pungutan biaya keikutsertaan dalam memperebutkan hadiah. Maka, praktik seperti ini sama juga halnya dengan *al-maysir* (judi). Hal itu karena termasuk di dalam praktik *al-maysir* (*al-qimâr*/judi), pihak yang menang mendapatkan keuntungan dari pihak yang kalah, atau pihak yang beruntung mendapatkan keuntungan dari pihak yang tidak beruntung. Setiap perkara dimana di dalamnya beberapa orang terlibat dalam bentuk bahwa yang menang akan mendapatkan dari yang kalah, maka praktik seperti ini termasuk judi.



3) Jual beli disertai hadiah dengan cara diundi terhadap suatu benda yang kualitasnya dibawah standar dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran, jelas transaksi jual beli tersebut tidak diperbolehkan dan tidak halal karena mengandung unsur judi. Karena dengan demikian, kupon hadiah yang akan diundi untuk mendapatkan hadiah bukan merupakan pemberian cuma-cuma, melainkan secara tidak langsung dijual kepada pembeli dengan uang (harga) yang sudah ditambahkan ke dalam harga penjualan barang. Dengan demikian, secara tidak langsung kupon undian tersebut diperjualbelikan kepada pembeli barang, yang jika dia tidak mendapatkan hadiah maka akan rugi, sedangkan

pihak penjual akan diuntungkan. Hal seperti ini mengandung penipuan dan juga mengandung unsur judi maka jual beli dengan disertai hadiah ini tidak diperbolehkan oleh hukum Islam.¹²⁶

Jual beli disertai dengan hadiah sebagai strategi penjualan yang dilakukan penjual sangatlah beragam, maka dalam hal menghukuminya tidak bisa disamaratakan semuanya adalah haram, melainkan harus diteliti satu persatu bentuk dari pada hadiah dan metode pedagang dalam memberikannya. Islam memperbolehkan jual beli disertai dengan pemberian hadiah, selama tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.

¹²⁶Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia : Kumpulan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: al-Mawadah Prima, 2003), h. 290

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, dkk. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Rahman Ghazali, dkk. (2012). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Abdullah al-Mushlih, S. A.-S. (2011). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Penerjemah Abu Umar Basyir, Cet. III*. Jakarta: Darul Haq.
- Abi Yahya Zakariyya Asy-Syafi'i. (n.d.). *Asnal Mathalib*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Hafidz, A. W. (2006). *Kamus Ilmu Al-Qur'an, cet.2*. Jakarta: Amzah.
- Ali, Daud. (1991). *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jazairi, Addurahman. (1990). *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib Al-Arba'ah, Juz III*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- al-Jaziri, Abd.al-Rahman. (1972). *Kitab Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah, Juz III*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Kahlani, Muhammad. Ismail. (1960). *Subul Al-Salam, Juz III, Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy Mesir, Cet. IV*.
- Al-Maraghi, Ahmad. Mustafa. (1993). *Terjemahan Tafsir al-Maraghi 19*. Semarang: Toha Putra.
- Arikunto, Suharismi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ar-Raml, Syamsudin. Muhammad. (2014). *Nihayah Al-Muhtaj, Juz III*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Asy-Syatibi, Ahmad. I. (1975). *Al-Muwafakat Fii Ushul Asy-Syari'ah, Jilid II*. Dar Al-Ma'rifah.
- Bakry, Nazar. (1994). *Problematika Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basyir, Ahmad. Azhar. (2000). *Asas-Asas Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.

- Bukhari, Imam. (2002). *Shahih Bukhari*. Mesir: Dar Ibnu Hasyim.
- Bustami A. Ghani, d. (1984). *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 2*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Departemen Agama RI.
- Chairuman Pasaribu, S. K. (1996). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamdan Rasyid, S. H.-S. (2016). *Panduan Fiqih Sehari-Hari Dari Lahir Sampai Mati*. Jakarta Selatan: Wahyu Qolbu.
- Haroen, Nasrun. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Pers.
- Hasan, Muhammad. Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Idris, Syafi'i. Abdullah. (2013). *Ringkasan Kitab Al-Um Terjemahan Oleh Imron Rosadi, Amiruddin, dan Imam Awaliddin, Juz III*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Indonesia, Departemen. Agama. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Cet-2*. Bandung: Mizan Buaya Kreatif.
- Ja'far, Khumeidi. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung.
- Kartono, Kartini. (1986). *Pengantar Metode Riset*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kebudayaan, Departemen. Pendidikan. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khallaf, Ahamd. Wahab. (2003). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amam.
- Koto, Alaidin. (2004). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kountur, Roni. (2014). *Metodologi Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: UI Press.
- Mahmudah, Siti. (2016). *Historitas Syari'ah : Kritik Relasi-Relasi Khalil Abdul Kasim*. Yogyakarta: LKiS.
- Mansur, Said. Wajih. (n.d.). *Ahkamul Hadiah Fi al-Fiqh al-Islami*.

- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Mijieb, Ahmad. (2001). *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Nuha.
- Moloeng, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Abdul Mujib, M. T. (1994). *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Muhammad, Abdul. Kadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Taqiy. al.-Din. (2007). *Kifayat al-Khiyar*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Munawwir, Ahmad. Warson. (1997). *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Muslich, Muhammad. Wardi. (2010). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Kreasindo Media Cita.
- Nasional, Departemen. Pendidikan. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasiruddin, Muhammad. (2005). *Muhammad Nashiruddin Al-Albani*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nazir, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prastowo, Andi. (2010). *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Qa'aji, Muhhamd. (2018, Juni 24). Mu'jam Lughatil Fuqaha. *dalam al-Maktabah asy-syamilah al-Isdar ats-tsani, Juz II*, p. 493.
- Qardhawi, Yusuf. (n.d.). *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyis Al-Battani*.
- Raco, J.R (2008). *Metode Penelitian Kuaalitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Gratisindo.
- Rasyid, Hamdan. (2001). *Fiqh Indonesia: Kumpulan Fatwa-Fatwa Aktual*. Jakarta: AAl-Mawaddah Prima.

- Rasyid, Ibnu. (n.d.). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayyah al-Muqtasid, Juz II*. Semarang: Toha Putra.
- Razak dan Rais Lathie. (1998). *Shahih Muslim, Bab Hibah, Cet.3*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- RI, Departemen. Agama. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro.
- Rofiq, Ahmad. (1997). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Said. (n.d.). *Fiqh Al-Sunnah, Juz III*. Kairo: Maktabah Asy Syamilah Dar al-Turas.
- Sabiq, Said. (n.d.). *Fiqh Sunnah (terj) Ahli Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid XII*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Saebani, Bani. Ahmad. (2009). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Shihab, Muhammad. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah, Vol.2*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soeharjo. (2002). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. (1983). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Praditya Paramita.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suma, Muhammad. Amin. (2013). *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Pragonatama Jaya.
- Susiadi. (2015). *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Syafe'i, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tika, Muhammad. Pambudu. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yunus, Muhammad. (1982M-1402H). *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: Hidakarya Agung.

Zuhaili, Wahbah. (1989). *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu, Juz 4*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Sumber Jurnal:

Rohman, Abdur. (2016). Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam MLM. *Al-Adalah, Vol.XIII, No.2*, 6.

Siswadi. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ummul Quro Vol.III, No.2*, 61.

Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3, No.2*, 249.

Sumber Internet:

Sekilas Web, <http://www.google.com/amp/s/sekilasweb.wordpress.com/2015/0/4/28/macam-macam-hadiah-dan-hukumnya-1/amp/> (24 Juli 2019)

Sumber Lainnya:

Pengurus NU Jatim Tentang Keputusan Bahtsul Masail NU Wilayah Jatim, (Surabaya: 1986)